



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MULYATI**
2. Jabatan : **AUDITOR MADYA**
3. NHK : **634389**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.036.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/50 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/93 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 186.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 219.000.000**

1. MOBIL, DATSUN DATSUN GO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 30.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	117.942.473
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.402.942.473
III. HUTANG	Rp.	647.976.700
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.754.965.773

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.